

**PEMASUKAN MATERI LITERASI KEUANGAN DALAM KURIKULUM PROGRAM
KULIAH KERJA NYATA (KKN) SEBAGAI MEDIA EDUKASI LITERASI KEUANGAN
PELAKU UMKM**

Dwi Nurjanati

*Magister Pendidikan Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta
sukesduik@gmail.com*

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2013 menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara lain yaitu sebesar 21,8 persen. Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi perilaku dan pemahaman keuangan masyarakat. Lulusan perguruan tinggi sebesar 56,4%, lulusan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) sebesar 35,7%, prosentase semakin menurun bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) sebesar 24,6% dan yang tidak mengenyam pendidikan sebesar 16,3%. Rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi salah satu penyebab adanya krisis keuangan. Kondisi ini menuntut berbagai pihak untuk mengadakan program edukasi keuangan dan sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai bagian masyarakat yang bergerak secara mandiri untuk pembangunan ekonomi. Pihak UMKM sering mengalami kesulitan saat akan mengakses dana karena kurangnya pengetahuan tentang literasi keuangan usaha. Saat ini program literasi keuangan baru dilaksanakan oleh pihak OJK selaku bagian dari pemerintahan serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Dibutuhkan peran serta dunia pendidikan dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang terdidik memiliki potensi yang besar untuk turut berkontribusi dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat. Melalui pemasukan materi literasi keuangan dalam kurikulum program Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa dapat lebih berkontribusi untuk turut meningkatkan literasi keuangan masyarakat tentunya dengan bekal yang diperoleh dari bangku kuliah di perguruan tinggi bekerjasama dengan pihak OJK dan PUJK.

Kata kunci : literasi keuangan, KKN, UMKM

ABSTRACT

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2013 survey describe that the money literation in Indonesian people is lower compare the other country is 21,8 percent. The educational level in society influence financial literation and behaviour of society. Graduate of university for 56,4%, graduate of high school 35,7%, the percentage is few for graduate of elementary school 24,6%, and no school 16,3%. As low financial literation a cause of financial crisis. This condition sue the other sides to make financial education and sosialization program to increase society financial literation especially the Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) is part of society to economic development. UMKM suffered difficulty to access the funds because the lack of financial literation. Now, the financial literation program was executed by OJK a part of government and Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Required participation of educational to increase the financail literation. The students is the part of society have big participation to increase the financial literation. Through the piece of finansial literation to Kuliah Kerja Nyata (KKN) curriculum, the students can contribute to increase financial literation ofcourse with the provisions science in university collaborated with OJK and PUJK.

Keyword: financial literation, KKN, UMKM

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya yaitu jumlah penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru. Jumlah penduduk pada tahun 2016 menurut data BPS yaitu sebesar 257.912.349 jiwa. Tingginya

jumlah penduduk Indonesia menjadi salah satu aset yang bisa dikembangkan untuk peningkatan perekonomian nasional dengan pemberdayaan masyarakat secara baik dan terstruktur.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi serta ekonomi dunia, masyarakat kini semakin cerdas. Masyarakat semakin dekat dengan berbagai macam informasi dan dapat mengaksesnya dengan mudah. Sehingga memungkinkan semua lapisan masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang segala macam kebutuhan hidup dan masa depannya, salah satunya yaitu tentang dana alokasi untuk masa depan dan investasi. Tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat berharap masa depannya lebih baik. Maka berbagai upaya untuk mempersiapkan masa depan dilakukan salah satunya dengan berinvestasi atau menyimpan sebagian dananya untuk digunakan dimasa yang akan datang. Banyak sebab dan alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan investasi. Seseorang memutuskan berinvestasi terhadap sesuatu hal bergantung pada (1) sejauh mana keputusan dapat memaksimalkan kekayaan (*economic*), (2) *behavioral motivation* (keputusan investasi berdasarkan aspek psikologis investor) (Natalia Christanti dan Linda Ariany Mahastanti, 2011).

Saat ini muncul berbagai macam produk investasi yang ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) kepada masyarakat. Jenis produk investasi yang ditawarkan beragam dan masing-masing memiliki keunggulan dan juga kekurangan masing-masing. Namun tumbuhnya produk investasi yang banyak ini tidak diimbangi dengan kondisi literasi atau pengetahuan keuangan di masyarakat. Sebagian masyarakat mengalami tindakan penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyaknya penipuan yang terjadi ditengah masyarakat ditimbulkan karena rendahnya literasi keuangan masyarakat. Rendahnya literasi atau pemahaman masyarakat tentang keuangan bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atau ketidakpahaman masyarakat sendiri.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian negara yang muncul dari masyarakat secara langsung. UMKM mampu bertahan dalam segala situasi bahkan saat krisis moneter ditahun 2008 silam disaat banyak perusahaan besar skala nasional gulung tikar, UMKM tetap stabil dan berjalan bahkan mampu menyerab ribuan tenaga kerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak perusahaan. Namun kenyataannya adalah banyak UMKM yang hingga saat ini sulit berkembang. Hal ini terjadi karena kurangnya modal dan keterampilan serta ilmu pengelolaan keuangan usaha. Fenomena yang lain adalah UMKM mengalami kesulitan saat mengakses lembaga keuangan selaku PUJK untuk mengembangkan usahanya. Hal ini terjadi karena beberapa persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan belum bisa dipenuhi oleh UMKM sehingga pengajuan proposal dana belum bisa diterima.

Beragamnya fenomena rendahnya literasi keuangan masyarakat perlu menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini OJK, PUJK, serta dunia pendidikan yang memiliki ruang untuk melaksanakan teknis edukasi tentang literasi keuangan pada masyarakat. Mahasiswa selaku bagian dari masyarakat terdidik hendaknya mampu berkontribusi ambil bagian dalam peningkatan literasi keuangan dimasyarakat. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka meningkatkan literasi keuangan yaitu melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah diselenggarakan oleh pihak perguruan tinggi setempat sebagai perwujudan pengabdian masyarakat dari mahasiswanya. Melalui program KKN, lembaga pendidikan bisa berkontribusi dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat dengan memasukkan kurikulum tentang pengelolaan keuangan. Sasaran utama yaitu masyarakat dimana mahasiswa melaksanakan KKN terutama UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian negara yang muncul langsung dari masyarakat.

Pemerintah melalui lembaga independen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun program pencerdasan masyarakat mengenai literasi keuangan. Melalui program peningkatan literasi keuangan diharapkan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mampu tetap bertahan untuk mengembangkan usaha melalui pemahaman literasi keuangan.

II. PEMBAHASAN

A. LITERASI KEUANGAN

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 14 Februari 2014 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat. Ketentuan ini berlaku mulai 6 Agustus 2014. Peraturan ini muncul sebagai upaya pihak ketiga yaitu pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan atau literasi keuangan masyarakat Indonesia. Maka dengan hadirnya peraturan ini pula, seluruh

Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menyelenggarakan Edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. PUJK yang dimaksud yaitu Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan.

Literasi keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan (2013) yaitu kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang. Pengelolaan dana agar berkembang bertujuan sebagai salah satu upaya menghasilkan sesuatu untuk bertahan hidup dan menghasilkan kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang.

Menurut Chen dan Volpe (1998) adalah sebagai kemampuan mengelola keuangan agar hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang. Menurut Lusardi & Mitchell (2007) literasi keuangan yaitu pengetahuan keuangan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Menurut Houston (2010) dalam penelitian Widyawati (2012) menyatakan bahwa literasi keuangan terjadi ketika individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi keuangan yaitu kemampuan seorang individu atau kelompok dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk tujuan mencapai kesejahteraan.

Tujuan literasi keuangan adalah (1) Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate, (2) Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan. Manfaat literasi keuangan bagi masyarakat yaitu (1) Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan; memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, (2) Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas, (3) Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan.

Remund (2010) dalam penelitian Widyawati (2012) menyatakan ada empat hal yang paling umum dalam literasi keuangan yaitu penganggaran, tabungan, pinjaman, dan investasi. Penganggaran bertindak sebagai tahap awal perencanaan keuangan yang meliputi pemasukan diterima dan pengeluaran yang akan dilakukan. Perencanaan ini bermanfaat agar individu mengetahui kran dan celah apa yang bisa dioptimalkan atau dikurangi. Tabungan bermanfaat untuk menyisihkan sebagian dana untuk disimpan dalam bentuk dana segar. Pinjaman merupakan pilihan yang bisa diambil jika terdapat kondisi pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan atau hal lain. Investasi dilakukan dengan menyisihkan sebagian dana untuk dialokasikan dalam bentuk aset tetap maupun tidak tetap.

Survei OJK dalam Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016 menunjukkan sebanyak hanya 42,13% bagian dari masyarakat yang melakukan penyusunan perencanaan keuangan dengan membuat penganggaran dana terlebih dahulu. Sebanyak 75,29% masyarakat telah menabung untuk kebutuhan masa depannya. Sebanyak 38,36% masyarakat bekerja atau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pilar utama OJK dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang literasi keuangan kepada masyarakat yaitu mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan, berbicara tentang pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau. Ketiga pilar ini menjadi fokus utama OJK mengadakan program yang menunjang peningkatan pemahaman literasi keuangan agar masyarakat melek finansial. Tingginya literasi keuangan akan berpengaruh pada peningkatan kondisi perekonomian bangsa. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik akan semakin mudah dalam menentukan jenis produk perbankan yang tepat baginya dan sesuai dengan kebutuhannya. Indeks literasi keuangan berdasarkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2013-2016 menunjukkan adanya peningkatan dari 21,84% menjadi 29,66%.

Survei OJK tahun 2013 menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara lain yaitu sebesar 21,8 persen.

Artinya jika di suatu wilayah terdapat 1.000 jiwa maka hanya sebanyak 218 orang saja yang memahami macam produk keuangan untuk investasi masa depan. Maka sisa dari jumlah ini belum sepenuhnya memahami atau bahkan sama sekali tidak memahami produk investasi yang tersedia. Berdasarkan survei tersebut, tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian yaitu: (1) *Well Literate* yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan, sebesar 21,84%, (2) *Sufficient Literate* yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, sebesar 75,69%, (3) *Less Literate* yaitu hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan, sebesar 2,06%, dan (4) *Not Literate* yaitu tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan, sebesar 0,41%.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 122,4 juta jiwa. Angka ini mengalami penambahan jumlah dari tahun 2014 sebanyak 510 ribu jiwa. Jumlah penduduk bekerja sebanyak 114,8 juta jiwa mengalami kenaikan 190 ribu jiwa dari tahun 2014. Angka pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 7,02 juta jiwa atau sebesar 5,5%. Jumlah ini menurun dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 6,18% lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 5,94%. Artinya terjadi kenaikan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun pada tahun 2014 dan mengalami penurunan pada tahun 2016. Tingginya tingkat pengangguran ini menjadi masalah yang hendaknya segera diberikan solusi. Salah satu upaya untuk pengentasan pengangguran dan kemiskinan masyarakat adalah dengan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha pihak masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk bertahan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha Mikro menurut UU tersebut adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Tujuan adanya UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Asas berdirinya UMKM yaitu kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Secara umum ciri-ciri UMKM yaitu manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Artinya bahwa secara keseluruhan kegiatan yang berjalan dalam UMKM masih terbatas pada lingkup kecil dan sederhana.

UMKM memberikan kontribusi dalam perolehan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 58,92% dan menyerap tenaga kerja sebesar 97,30% pada tahun 2015. Sebanyak 88,8-99,9% bentuk usaha telah berdiri di Indonesia dan menyerap tenaga kerja sebanyak 51-97,2%. Angka ini cukup tinggi dan menjadikan UMKM sebagai salah satu

program yang hendaknya dikembangkan. Artinya semakin tinggi dan berkembangnya UMKM di Indonesia memberikan dampak yang baik dan positif bagi perbaikan perekonomian bangsa.

C. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Program Edukasi Literasi Keuangan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu perwujudan dari tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk melaksanakan KKN pada daerah atau desa yang telah ditentukan sebagai obyek pengabdian masyarakat. KKN merupakan suatu kegiatan intrakurikuler yang bertujuan untuk memadukan pelaksanaan perwujudan tri dharma perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa sebagai tenaga untuk melaksanakan pembangunan masyarakat di pedesaan. KKN merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.

Kegiatan KKN melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu mahasiswa, masyarakat, dan perguruan tinggi. Secara konkrit, karena melibatkan mahasiswa, perguruan tinggi, dan masyarakat, menjadikan kegiatan KKN tidak hanya memberikan pengalaman dan pembelajaran di lapangan bagi mahasiswa peserta KKN, namun juga memberikan manfaat secara langsung dirasakan oleh masyarakat serta menjadi penghubung antara dunia akademik teoritik dengan dunia empirik. Lama pelaksanaan KKN yaitu satu hingga dua bulan. Mahasiswa dengan kemampuan bidang masing-masing aktif dalam pelaksanaan KKN sehingga memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan menjadi langkah awal untuk berintegrasi dengan masyarakat (Koesnadi Hardjosoemantri, 2007).

Tujuan pelaksanaan KKN yaitu (1) Meningkatkan semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan mahasiswa se Indonesia, (2) Mendorong dan memacu pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, (3) Meningkatkan peran dan kontribusi nyata perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pembangunan nasional, (4) Mengembangkan wawasan, karakter dan soft skill mahasiswa, (5) Menanamkan jiwa dan nilai-nilai kebersamaan, kemandirian, etos kerja dan tanggung jawab. Harapan dari pelaksanaan KKN yaitu adanya peningkatan kualitas masyarakat. Ranah pelaksanaan KKN yaitu pengembangan kepribadian mahasiswa (*personality development*), pemberdayaan masyarakat (*community development*), dan pengembangan kelembagaan (*institutional development*). Berdasarkan ketiga ranah tersebut, sasaran KKN meliputi mahasiswa sebagai pelaksana teknis di lapangan, perguruan tinggi sebagai pengelola dan penyandang dana, serta masyarakat sebagai obyek pengabdian. Ketiga ranah hendaknya bersinergi agar tercapai tujuan yang telah direncanakan.

Pardjono (2005) mengemukakan pemberdayaan masyarakat melalui KKN meliputi tiga ranah yaitu penyadaran, pembelajaran, dan pendampingan. Penyadaran artinya melalui program KKN yang dilaksanakan tersebut mampu mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang potensi dan kemampuan yang dimilikinya sehingga mendorong masyarakat untuk bekerja keras, menumbuhkan keunggulan, serta memiliki kemampuan untuk kekluar dari tekanan hidup yang semakin berat. Pembelajaran artinya melalui KKN, mahasiswa dan masyarakat mampu menjadi *learning society* atau masyarakat pembelajar sehingga dengan semangat pembelajar akan mendorong masyarakat untuk selalu belajar sehingga memunculkan generasi yang dewasa dan memiliki jati diri yang mantap. Pendampingan artinya mahasiswa sebagai pelaksana KKN memiliki fungsi untuk mendampingi masyarakat melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian sehingga masyarakat percaya dan mendukung terlaksanakannya seluruh program KKN.

Anggota pelaksana KKN terdiri dari mahasiswa lintas jurusan dan fakultas dibentuk satu tim merencanakan program pengabdian masyarakat sehingga memberikan kontribusi secara nyata. Program KKN berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jenis KKN dibagi menjadi dua yaitu KKN lintas fakultas dan KKN lintas universitas yang dikenal dengan nama KKN Kebangsaan. KKN Kebangsaan adalah KKN yang dilaksanakan secara nasional oleh perguruan tinggi di Indonesia

dengan pendekatan lintas keilmuan pada suatu waktu dan daerah tertentu dengan mengangkat tema yang bersifat strategis.

Masyarakat sebagai komponen sosial terbesar memiliki potensi yang sangat besar bagi suatu negara untuk dikembangkan. Kegiatan usaha yang berbasis masyarakat berupa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki potensi yang sangat baik untuk turut menopang perkembangan ekonomi nasional. UMKM terbukti tetap bertahan saat terjadi krisis moneter pada tahun 2008 dimana banyak perusahaan besar skala nasional gulung tikar dan melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Kondisi tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi dengan pemasukan menjadikan perusahaan besar tidak mampu bertahan, namun UMKM tetap stabil bahkan mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh (1) sebagian besar UMKM memproduksi barang dengan elastisitas permintaan rendah, sehingga perubahan jumlah pendapatan masyarakat tidak mempengaruhi jumlah permintaan, (2) sebagian besar UMKM tidak memperoleh bantuan dana dari bank, sehingga saat kondisi ekonomi dan perbankan terguncang oleh krisis ekonomi, UMKM tetap stabil dan tidak terpengaruh.

Keberadaan UMKM dinilai memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai alternatif penopang perekonomian nasional. Kenyataannya, meski UMKM hingga saat ini tetap bertahan, keberadaan UMKM dinilai belum optimal pengelolaannya. Masyarakat sebagai penggerak utama UMKM masih menghadapi berbagai macam masalah untuk mengembangkan usahanya. Salah satu masalah yang dihadapi UMKM yaitu rendahnya literasi keuangan. Keberadaan UMKM hingga saat ini masih terbatas pada skala kecil menengah. Hal ini disebabkan salah satunya karena terbatasnya dana serta sistem pengelolaan usaha. Banyak UMKM yang terkendala saat mengajukan dana kepada pihak lembaga keuangan karena ada beberapa persyaratan yang telah ditentukan belum bisa terpenuhi. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan literasi keuangan pelaku UMKM dalam menjalankan manajerial usahanya masih tergolong rendah. Dibutuhkan solusi peningkatan kualitas pelaku UMKM melalui literasi keuangan agar keberadaan UMKM bisa berkembang.

Peningkatan kualitas masyarakat khususnya UMKM dalam literasi keuangan bisa dilaksanakan oleh mahasiswa dengan program KKN melalui pendidikan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan UMKM. Upaya meningkatkan literasi keuangan oleh mahasiswa melalui KKN merupakan salah satu investasi pendidikan. Memajukan investasi pendidikan dan keterampilan adalah kunci pertumbuhan masa depan yang dapat meningkatkan produktivitas serta menjadi solusi utama dari permasalahan klasik yang ada yakni pengangguran dan problema kesetaraan gender (Ika Nur Wahyuni, 2015).

Peningkatan literasi keuangan UMKM melalui pendidikan berupa program KKN merupakan kegiatan terintegrasi yang melibatkan mahasiswa, masyarakat, dan perguruan tinggi. Mahasiswa secara langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai obyek pengabdian untuk melaksanakan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemasukan materi literasi keuangan dalam kurikulum KKN akan berdampak langsung kepada pelaku UMKM dan dapat dipraktikkan secara langsung untuk meningkatkan kualitas usahanya. Ketika terjadi peningkatan ilmu tentang literasi keuangan pada UMKM maka akan diikuti oleh kesadaran pelaku UMKM untuk berbenah memajukan usahanya sehingga akan menguatkan usahanya. Secara skala nasional, ketika banyak pelaku UMKM menerapkan ilmu literasi keuangan dan membuat sistem manajerial usaha yang baik, akan berdampak pada perbaikan perekonomian nasional sehingga ekonomi meningkat dan berdaya saing.

III. KESIMPULAN

1. Literasi keuangan penting difahami oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk mengelola usahanya
2. UMKM sebagai aset negara yang mampu bertahan dalam segala kondisi hendaknya mendapatka perhatian khusus dalam hal pengelolaan dan literasi keuangan, sehingga memiliki kesempatan untuk bisa berkembang.
3. Mahasiswa menjadi *agent of change* untuk melaksanakan perubahan mampu berkontribusi secara aktif dalam pengembangan perekonomian nasional dengan meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM melalui program KKN.

4. Pemasukan materi literasi keuangan pada kurikulum KKN merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas UMKM sehingga lebih maju dan berdaya saing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan pemberiannya selama ini semoga berkah dan dimudahkan segala urusan. Terimakasih atas dukungan dari suami tercinta serta putra pertama yang akan genap tiga tahun dibulan april ini serta anak kedua yang masih dalam kandungan umur lima bulan semoga selalu sehat dan semangat menemani mama menunaikan tesis selesai semester ini, bapak, ibu, keluarga besar yang selalu setia mendukung, serta dosen dan rekan Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

REFERENSI

- Kompilasi Buku Panduan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2015
- LPPM UGM. 2003. *Buku Pedoman Pelaksanaan KKN-UGM Tematik 2003*. LPPM UGM.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2007. Peran Pemuda Pelajar Indonesia Dalam Perjuangan Bangsa. *Jurnal Sejarah*. Vol. 13, No. 13. hlm. 8.
- Supriyanto. 2006. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Vol. 3 No. 1
- Pardjono. 2005. *Program pemberdayaan masyarakat: Kumpulan modul pembekalan kuliah kerja nyata Universitas Negeri Yogyakarta*. LPM UNY
- Feni Dwi A, Imam H, Ainul H. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1 No.6 Hal. 1286-1295
- Fahri Ardiansyah. Sejarah, Falsafah, Arti, Tujuan, Sasaran Kuliah Kerja Nyata (KKN). <http://fahriardiansyah22.blogspot.co.id/2014/02/sejarah-falsafah-arti-tujuan-sasaran.html>, diakses 7 April 2017, pukul 15.12 wib.
- UGM. Kuliah Kerja Nyata. <http://ugm.ac.id/id/node/2320-kuliah.kerja.nyata>, diakses 7 April 2017, pukul 21.26 wib.
- Jurnal Asia. OJK Ajak Mahasiswa Jadi Agen Edukasi dan Literasi. <https://www.jurnalasia.com/bisnis/info-bank/ojk-ajak-mahasiswa-jadi-agen-edukasi-dan-literasi/>, diakses 7 April 2017, pukul 23.45 wib.